



LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke : 42 (empat puluh dua)
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat/ke-8
Hari, Tanggal : Senin, 10 Oktober 2016
Pukul : 15.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Penjelasan Menkominfo dan Ketua KPI Pusat terkait dengan proses perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) (tindak lanjut Raker dan RDP Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Ketua KPI Pusat tanggal 3 Oktober 2016)
Hadir : 1. ... orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Menkominfo, Rudiantara
b. Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 15.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker dan RDP Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Ketua KPI Pusat pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI menilai Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) terhadap 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) akan berakhir tahun 2016, tidak cukup didukung oleh data yang kuat dan konsisten, serta menggunakan parameter penilaian yang belum sepenuhnya obyektif, dan belum secara optimal memperhatikan masukan dari masyarakat.
2. Selanjutnya proses perpanjangan IPP 10 LPS di atas, agar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah bersama KPI Pusat untuk mempersiapkan sistem evaluasi dan penilaian tahunan berikut pendokumentasiannya dan melaporkan kepada Komisi I DPR RI.
4. Komisi I DPR RI mendesak KPI Pusat memperbaiki surat komitmen 10 LPS di atas untuk ditandatangani oleh Komisaris Utama bersama Direktur Utama atau Presiden Direktur.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.55 WIB.

Jakarta, 10 Oktober 2016
KETUA RAPAT,

TTD

MEUTYA VIADA HAFID
A-235